



Analisis Pengaruh Pemanfaatan Sdp Terhadap Produktivitas Kerja Pegawai Pemasyarakatan

Zhuryfa Almas Azhzainsie

Politeknik Imigrasi dan Bimbingannya, Indonesia

Email Korespondensi: zhuryfazie@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 30 Juni 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the impact of the use of the Correctional Database System (SDP) on the work productivity of correctional officers, particularly in the areas of administration, the provision of inmate rights, reporting, rehabilitation, and decision-making. The SDP is viewed as a digital tool that plays a crucial role in supporting the transformation of correctional governance from a manual system to a data-driven system that is more organized, efficient, and accountable. The research method employed is descriptive qualitative with a literature review approach. Data were collected through an analysis of various scientific journals, articles, regulations, and relevant documents discussing the SDP, work productivity, and correctional services. The data were analyzed descriptively by linking the utilization of SDP to efficiency, accuracy, obstacles, and efforts to optimize employee performance. Research findings indicate that the use of SDP can improve employee productivity by streamlining data management, reducing reliance on manual record-keeping, enhancing the accuracy of information, and simplifying the preparation of reports and the verification of inmates' rights. SDP also supports more transparent services and data-driven decision-making. However, its implementation still faces obstacles such as unstable internet connectivity, limited technological resources, uneven employee competencies, and suboptimal inter-agency integration. These conditions indicate that technology requires organizational support, disciplined data input, and leadership commitment so that its benefits extend beyond administrative aspects. Therefore, SDP optimization must be achieved through employee training, infrastructure strengthening, data input standardization, information security protection, and continuous system evaluation.

Keywords: Productivity, Correctional Officers, Correctional Database System

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) terhadap produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan, khususnya dalam aspek administrasi, pelayanan hak narapidana, pelaporan, pembinaan, dan pengambilan keputusan. SDP dipandang sebagai instrumen digital yang berperan penting dalam mendukung transformasi tata kelola pemasyarakatan dari sistem manual menuju sistem berbasis data yang lebih tertib, cepat, dan akuntabel. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh melalui telaah berbagai jurnal ilmiah, artikel, peraturan, dan dokumen relevan yang membahas SDP, produktivitas kerja, serta pelayanan pemasyarakatan. Data dianalisis secara

deskriptif dengan menghubungkan pemanfaatan SDP terhadap efisiensi, akurasi, hambatan, dan upaya optimalisasi kerja pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SDP dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai melalui percepatan pengelolaan data, pengurangan ketergantungan pada pencatatan manual, peningkatan akurasi informasi, serta kemudahan dalam penyusunan laporan dan verifikasi hak warga binaan. SDP juga mendukung pelayanan yang lebih transparan dan pengambilan keputusan berbasis data. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi hambatan berupa jaringan internet yang belum stabil, keterbatasan sarana teknologi, kompetensi pegawai yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi antarinstansi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa teknologi memerlukan dukungan organisasi, kedisiplinan input data, dan komitmen pimpinan agar manfaatnya tidak berhenti pada aspek administratif. Oleh karena itu, optimalisasi SDP perlu dilakukan melalui pelatihan pegawai, penguatan infrastruktur, standarisasi input data, perlindungan keamanan informasi, dan evaluasi sistem secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Produktivitas, Pegawai Pemasarakatan, Sistem Database Pemasarakatan

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan besar dalam tata kelola organisasi publik, termasuk pada lingkungan pemasarakatan. Lembaga Pemasarakatan, Rumah Tahanan, Balai Pemasarakatan, dan unit pelaksana teknis lainnya dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang cepat, akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tuntutan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kompleksitas tugas pemasarakatan yang meliputi pendataan warga binaan, pembinaan, pengawasan, pemenuhan hak narapidana, pelaporan, hingga penyediaan informasi bagi pimpinan dan instansi terkait (Julianne & Indawati, 2025).

Salah satu bentuk pemanfaatan teknologi dalam sistem pemasarakatan adalah penerapan Sistem Database Pemasarakatan (SDP). SDP berfungsi sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, menyajikan, dan mengomunikasikan data pemasarakatan secara lebih sistematis (Kutaraja & Nasution, 2025). Melalui SDP, data warga binaan seperti identitas, status hukum, masa pidana, riwayat pembinaan, catatan perilaku, serta informasi terkait hak-hak narapidana dapat dikelola secara digital. Keberadaan sistem ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap pencatatan manual yang selama ini rawan menimbulkan keterlambatan, duplikasi data, kesalahan pencatatan, dan kesulitan dalam pencarian arsip (Wibowo dkk., 2025).

Pemanfaatan SDP memiliki hubungan erat dengan produktivitas kerja pegawai pemasarakatan. Produktivitas pegawai tidak hanya diukur dari banyaknya pekerjaan yang dapat diselesaikan, tetapi juga dari efisiensi waktu, ketepatan data, kualitas pelayanan, dan kemampuan pegawai dalam menjalankan tugas sesuai prosedur. Dengan adanya SDP, pegawai dapat bekerja lebih cepat dalam melakukan input data, verifikasi dokumen, penyusunan laporan, serta pemantauan perkembangan warga binaan. Namun, manfaat tersebut tidak otomatis tercapai apabila masih terdapat hambatan seperti keterbatasan infrastruktur, jaringan internet yang tidak stabil, kemampuan pegawai yang belum merata, serta belum optimalnya integrasi data antarunit (Susanto dkk., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, pembahasan mengenai pengaruh pemanfaatan SDP terhadap produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan menjadi penting untuk dikaji. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan SDP dalam tugas pegawai pemasyarakatan, menjelaskan pengaruhnya terhadap efisiensi dan akurasi kerja, mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam penerapannya, serta merumuskan upaya optimalisasi SDP agar dapat meningkatkan produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka. Data diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti jurnal ilmiah, artikel, peraturan perundang-undangan, dan dokumen yang membahas Sistem Database Pemasyarakatan (SDP), produktivitas kerja, serta tata kelola pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan telaah literatur. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan mengkaji hubungan antara pemanfaatan SDP dan produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan, khususnya pada aspek efisiensi, akurasi, pelayanan, hambatan, serta upaya optimalisasi pemanfaatan sistem.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemanfaatan SDP dalam Tugas Pegawai Pemasyarakatan

Pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) dalam tugas pegawai pemasyarakatan menjadi bagian penting dari perubahan sistem kerja yang sebelumnya banyak bergantung pada pencatatan manual menuju sistem administrasi berbasis digital. SDP tidak hanya dipahami sebagai aplikasi penyimpanan data, tetapi juga sebagai instrumen kerja yang membantu pegawai dalam mengelola informasi warga binaan, mempercepat pelayanan, menyusun laporan, serta mendukung pengambilan keputusan. Dalam Permenkumham Nomor 39 Tahun 2016, SDP dijelaskan sebagai sistem informasi yang meliputi pengumpulan, penyaringan, pengelolaan, penyajian, dan pengomunikasian informasi pemasyarakatan. Dengan demikian, pemanfaatan SDP berkaitan langsung dengan efektivitas pelaksanaan tugas pegawai, terutama dalam bidang registrasi, pembinaan, pelayanan hak narapidana, pengawasan, dan pelaporan (Nafi & Priyatmono, 2025).

a) Pemanfaatan SDP dalam pendataan warga binaan

Salah satu bentuk utama pemanfaatan SDP adalah untuk pendataan warga binaan pemasyarakatan. Pegawai pemasyarakatan menggunakan SDP untuk memasukkan, memperbarui, dan menyimpan data narapidana maupun tahanan secara lebih sistematis. Data tersebut meliputi identitas warga binaan, status hukum, masa pidana, riwayat registrasi, penempatan, catatan pembinaan, serta informasi lain yang diperlukan dalam proses administrasi pemasyarakatan. Pendataan yang dilakukan melalui SDP membantu pegawai mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang rawan rusak, hilang, atau sulit ditemukan kembali ketika dibutuhkan.

Dalam sistem manual, pencarian data sering membutuhkan waktu lama karena pegawai harus membuka arsip atau mencocokkan beberapa dokumen secara terpisah. Melalui SDP, data dapat ditelusuri lebih cepat karena sudah tersimpan dalam sistem yang terstruktur. Hal ini berdampak pada meningkatnya kecepatan kerja pegawai, terutama ketika harus menyediakan data untuk kebutuhan internal Lapas, Rutan, Bapas, Kantor Wilayah, maupun Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Akan tetapi, manfaat ini hanya dapat berjalan optimal apabila pegawai melakukan input data secara disiplin, teliti, dan tepat waktu (Zulfedryan & Santoso, 2025).

b) Pemanfaatan SDP dalam pemenuhan hak narapidana

SDP juga dimanfaatkan pegawai dalam proses pemenuhan hak-hak narapidana, seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Hak-hak tersebut membutuhkan kelengkapan data administratif dan substantif, seperti perhitungan masa pidana, catatan kelakuan baik, keikutsertaan dalam program pembinaan, serta kelengkapan dokumen pendukung. Dengan adanya SDP, pegawai lebih mudah melakukan verifikasi karena data yang dibutuhkan sudah tercatat dalam sistem.

Pemanfaatan SDP dalam aspek ini penting karena kesalahan pencatatan atau keterlambatan pengolahan data dapat berdampak langsung pada hak warga binaan. Penelitian tentang penerapan SDP menunjukkan bahwa sistem administrasi manual dapat menyulitkan pengawasan terhadap hak narapidana, bahkan berpotensi menyebabkan hak tertentu terlewat. Oleh karena itu, SDP membantu pegawai bekerja lebih akurat dan objektif dalam memastikan bahwa hak narapidana diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.

c) Pemanfaatan SDP dalam pembinaan dan pengawasan

Dalam bidang pembinaan, SDP dapat digunakan untuk mencatat perkembangan warga binaan selama menjalani masa pidana. Pegawai dapat mendokumentasikan keikutsertaan warga binaan dalam program pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, kegiatan kerja, pendidikan, serta catatan perilaku sehari-hari. Data ini berguna sebagai dasar evaluasi pembinaan dan pertimbangan dalam pemberian hak integrasi.

Selain itu, SDP juga mendukung fungsi pengawasan. Pegawai dapat memantau informasi terkait penempatan warga binaan, perpindahan, kondisi hunian, maupun catatan pelanggaran. Dengan data yang lebih terintegrasi, pengawasan tidak hanya bergantung pada pengamatan langsung, tetapi juga didukung oleh informasi administratif yang terdokumentasi. Hal ini memperkuat objektivitas pegawai dalam menilai kondisi warga binaan dan mengurangi potensi keputusan yang hanya berdasarkan ingatan atau pertimbangan subjektif.

d) Pemanfaatan SDP dalam pelaporan dan pengambilan keputusan

Pegawai pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menyusun laporan rutin terkait kondisi warga binaan, kegiatan pembinaan, keamanan, serta perkembangan pelayanan. SDP membantu proses pelaporan karena data yang dibutuhkan dapat diolah dan disajikan secara lebih cepat. Sistem ini juga memudahkan koordinasi antara Unit Pelaksana Teknis, Kantor Wilayah, dan pusat karena data dapat diperbarui serta dipantau secara lebih terhubung.

Pada tingkat pimpinan, informasi yang tersedia dalam SDP dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Data mengenai jumlah warga binaan, status hukum, program pembinaan, dan pemenuhan hak dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tepat. Studi pada Bapas Kelas I Malang menunjukkan bahwa pengelolaan data yang belum terintegrasi dapat menyulitkan pegawai dalam menyediakan data secara cepat dan menghambat monitoring klien, sehingga sistem yang lebih terstruktur diperlukan untuk mendukung efektivitas kerja.

Dengan demikian, pemanfaatan SDP dalam tugas pegawai pemasyarakatan mencakup pendataan, pelayanan hak narapidana, pembinaan, pengawasan, pelaporan, dan pengambilan keputusan. SDP dapat meningkatkan produktivitas kerja karena membantu pegawai bekerja lebih cepat, mengurangi pekerjaan manual, memperbaiki akurasi data, dan mempercepat pelayanan. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, kestabilan jaringan, kualitas fasilitas teknologi, serta kedisiplinan pegawai dalam mengelola data (Susanto dkk., 2025).

Produktivitas Kerja Pegawai Pemasyarakatan

Produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan merupakan ukuran penting dalam menilai sejauh mana pegawai mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, akurat, dan sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam konteks pemasyarakatan, produktivitas tidak hanya diukur dari banyaknya pekerjaan administratif yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan data, kecepatan respons, kedisiplinan kerja, serta kemampuan pegawai dalam mendukung proses pembinaan warga binaan. Oleh karena itu, produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan perlu dipahami secara lebih luas karena tugas mereka tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menyangkut aspek pelayanan publik, pembinaan, pengawasan, keamanan, dan perlindungan hak warga binaan. Pemanfaatan teknologi seperti Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi produktivitas tersebut, sebab SDP membantu pengelolaan data, pelaporan, pemantauan pembinaan, dan pengambilan keputusan berbasis informasi yang lebih tertata (Putri dkk., 2025).

a) Konsep produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan

Produktivitas kerja pada dasarnya menggambarkan perbandingan antara hasil kerja yang dicapai dengan sumber daya yang digunakan. Dalam lingkungan pemasyarakatan, produktivitas tidak cukup hanya dilihat dari kecepatan pegawai menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga harus dilihat dari ketepatan, tanggung jawab, dan dampak pekerjaan tersebut terhadap pelayanan pemasyarakatan. Pegawai yang produktif bukan hanya pegawai yang mampu menyelesaikan banyak dokumen, melainkan juga pegawai yang mampu bekerja secara tertib, meminimalkan kesalahan, memberikan pelayanan tepat waktu, dan menjaga kepatuhan terhadap ketentuan hukum.

Konteks ini penting karena pekerjaan pemasyarakatan berkaitan dengan data sensitif dan hak-hak warga binaan. Kesalahan dalam pencatatan masa pidana, status hukum, perilaku, atau program pembinaan dapat berdampak serius terhadap pemenuhan hak narapidana. Oleh sebab itu, produktivitas pegawai

pemasyarakatan harus selalu dikaitkan dengan akurasi dan akuntabilitas kerja, bukan hanya dengan jumlah pekerjaan yang selesai.

b) Indikator produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan

Produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan dapat dilihat melalui beberapa indikator. Pertama, efisiensi waktu kerja, yaitu kemampuan pegawai menyelesaikan tugas dalam waktu yang lebih singkat tanpa mengurangi ketepatan hasil. Misalnya, pencarian data warga binaan, penyusunan laporan, dan verifikasi dokumen dapat dilakukan lebih cepat apabila sistem informasi yang digunakan berjalan baik.

Kedua, kualitas hasil kerja, yaitu ketepatan dan kelengkapan pekerjaan yang dihasilkan. Dalam pemasyarakatan, kualitas kerja tampak dari data yang valid, laporan yang rapi, pelayanan yang sesuai prosedur, serta keputusan administratif yang didasarkan pada informasi yang benar. Ketiga, ketepatan pelayanan, yaitu kemampuan pegawai memberikan pelayanan kepada warga binaan, keluarga, masyarakat, maupun instansi terkait secara cepat dan sesuai aturan.

Keempat, kemampuan adaptasi terhadap teknologi. Pegawai yang mampu menggunakan SDP dengan baik akan lebih mudah mengikuti perubahan sistem kerja digital. Sebaliknya, rendahnya literasi digital dapat menghambat produktivitas karena pegawai tetap bergantung pada pencatatan manual atau membutuhkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan berbasis sistem.

c) Faktor yang memengaruhi produktivitas kerja pegawai

Produktivitas pegawai pemasyarakatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi kemampuan, kedisiplinan, motivasi, tanggung jawab, dan keterampilan pegawai. Pegawai yang memiliki pemahaman baik terhadap tugas dan prosedur kerja cenderung lebih mampu menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat. Selain itu, keterampilan dalam menggunakan sistem digital juga menjadi faktor penting karena sebagian besar pekerjaan administrasi pemasyarakatan mulai diarahkan pada penggunaan teknologi informasi.

Faktor eksternal meliputi ketersediaan sarana kerja, kualitas jaringan internet, dukungan pimpinan, beban kerja, sistem organisasi, serta pelatihan yang diberikan. Penelitian mengenai penerapan SDP menunjukkan bahwa kendala seperti koneksi internet tidak stabil, kerusakan aplikasi, dan keterbatasan sistem dapat menghambat pelaksanaan tugas pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa produktivitas pegawai tidak hanya bergantung pada kemampuan individu, tetapi juga pada kesiapan sistem dan fasilitas kerja yang tersedia.

d) Produktivitas dalam pelayanan dan pembinaan warga binaan

Produktivitas pegawai pemasyarakatan juga terlihat dari kemampuan mereka dalam mendukung pelayanan dan pembinaan warga binaan. Pegawai yang produktif mampu memastikan bahwa data pembinaan tercatat dengan baik, hak-hak narapidana diproses sesuai ketentuan, serta kegiatan pembinaan dapat dipantau secara berkelanjutan. Sebelum adanya sistem digital, proses administrasi pemenuhan hak warga binaan sering dilakukan secara manual sehingga berpotensi menimbulkan keterlambatan pelayanan remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Dengan dukungan SDP, pekerjaan

tersebut dapat dilakukan lebih tertib karena data masa pidana, catatan perilaku, dan program pembinaan dapat dipantau secara lebih efisien.

Namun, produktivitas dalam pembinaan tidak boleh dipahami hanya sebagai kemampuan mengisi data ke dalam sistem. Pegawai tetap harus melakukan pengamatan langsung, komunikasi, dan penilaian terhadap perkembangan warga binaan. SDP berfungsi sebagai alat bantu, sedangkan kualitas pembinaan tetap bergantung pada profesionalisme pegawai dalam menjalankan tugas.

e) Produktivitas dalam pelaporan dan pengambilan keputusan

Pegawai pemasyarakatan juga dituntut produktif dalam menyusun laporan dan menyediakan data bagi pimpinan maupun instansi terkait. Dalam hal ini, produktivitas terlihat dari kecepatan pegawai menyajikan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data yang tersusun dengan baik akan membantu pimpinan dalam mengambil keputusan, menyusun kebijakan, mengawasi kapasitas hunian, serta mengevaluasi program pembinaan. Studi terkait Bapas menunjukkan bahwa penggunaan beberapa sistem yang belum terintegrasi, seperti SDP, Google Spreadsheet, dan pencatatan manual, dapat menyulitkan pegawai dalam menyediakan data secara cepat serta menghambat monitoring klien. Kondisi ini memperlihatkan bahwa produktivitas kerja sangat bergantung pada integrasi data dan kemudahan akses informasi.

Dengan demikian, produktivitas kerja pegawai pemasyarakatan merupakan hasil dari kombinasi antara kemampuan individu, dukungan teknologi, sistem kerja yang tertata, dan lingkungan organisasi yang mendukung. Pemanfaatan SDP dapat meningkatkan produktivitas apabila digunakan secara konsisten, didukung pelatihan, serta ditunjang infrastruktur yang memadai (Sartika, 2025).

Pengaruh SDP terhadap Efisiensi dan Akurasi Kerja Pegawai

Pemanfaatan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) memiliki pengaruh penting terhadap efisiensi dan akurasi kerja pegawai pemasyarakatan. Dalam lingkungan Lapas, Rutan, LPKA, maupun Bapas, pekerjaan pegawai sangat berkaitan dengan pengelolaan data warga binaan, pencatatan status hukum, pelayanan hak narapidana, pelaporan, pembinaan, serta pengawasan. Apabila seluruh proses tersebut dilakukan secara manual, maka pekerjaan cenderung memerlukan waktu lebih lama, rawan kesalahan, dan sulit dipantau secara cepat. Oleh karena itu, SDP hadir sebagai sistem digital yang membantu pegawai bekerja lebih sistematis, cepat, dan berbasis data. SDP juga diposisikan sebagai alat bantu kerja yang mendukung optimalisasi layanan kepada warga binaan, masyarakat, serta internal pemasyarakatan.

a) Pengaruh SDP terhadap efisiensi administrasi

Efisiensi kerja pegawai pemasyarakatan dapat dilihat dari kemampuan menyelesaikan pekerjaan dengan waktu, tenaga, dan sumber daya yang lebih hemat. SDP berpengaruh terhadap efisiensi karena sistem ini membantu mengurangi ketergantungan pegawai pada pencatatan manual. Sebelum penggunaan sistem digital, pegawai harus mencari berkas fisik, mencocokkan dokumen, menghitung masa pidana secara manual, dan menyusun laporan dengan

cara konvensional. Proses tersebut membutuhkan waktu panjang, terutama jika jumlah warga binaan banyak dan data tersebar di berbagai dokumen.

Dengan adanya SDP, data warga binaan dapat tersimpan dalam satu sistem yang lebih terstruktur. Pegawai dapat mencari identitas warga binaan, status hukum, riwayat registrasi, masa pidana, maupun informasi pembinaan secara lebih cepat. Hal ini memperpendek waktu pelayanan dan mempercepat penyelesaian tugas administratif. Dalam konteks masyarakat, efisiensi seperti ini sangat penting karena pegawai tidak hanya menangani pekerjaan administrasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam pembinaan, pengamanan, pelayanan, dan pengawasan.

b) Pengaruh SDP terhadap kecepatan pelayanan

SDP juga berdampak pada kecepatan pelayanan, terutama dalam proses pemenuhan hak narapidana. Hak seperti remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat membutuhkan data yang lengkap dan tepat. Data tersebut mencakup perhitungan masa pidana, catatan perilaku, keikutsertaan dalam program pembinaan, serta kelengkapan administratif lainnya.

Apabila data masih dikelola secara manual, pelayanan hak narapidana dapat terlambat karena pegawai harus melakukan pemeriksaan berulang terhadap dokumen fisik. Penelitian tentang penerapan SDP menunjukkan bahwa sistem administrasi manual dapat menyulitkan kontrol terhadap proses pidana dan pemenuhan hak narapidana, bahkan berpotensi menyebabkan beberapa hak terlewat. Dengan SDP, pegawai dapat melakukan verifikasi data secara lebih cepat sehingga proses pelayanan menjadi lebih efisien dan tertib.

c) Pengaruh SDP terhadap akurasi data

Selain efisiensi, SDP juga berpengaruh terhadap akurasi kerja pegawai. Akurasi data merupakan aspek yang sangat penting dalam masyarakat karena kesalahan informasi dapat berdampak langsung terhadap hak warga binaan dan kualitas keputusan organisasi. Misalnya, kesalahan dalam pencatatan tanggal penahanan, lama pidana, status hukum, atau catatan pembinaan dapat menyebabkan kekeliruan dalam pemberian remisi, pembebasan bersyarat, atau program integrasi lainnya.

SDP membantu meningkatkan akurasi karena data dimasukkan, disimpan, dan diperbarui dalam sistem yang lebih terorganisasi. Sistem ini memungkinkan pegawai melakukan pengecekan ulang terhadap informasi yang tersedia, sehingga potensi duplikasi, kehilangan data, atau ketidaksesuaian dokumen dapat dikurangi. Namun, perlu ditegaskan bahwa SDP tidak otomatis menjamin data selalu benar. Akurasi tetap bergantung pada ketelitian pegawai saat melakukan input, pembaruan, dan validasi data.

d) Pengaruh SDP terhadap pengurangan human error

Salah satu masalah dalam pekerjaan administratif adalah human error, seperti salah mengetik data, salah menghitung masa pidana, lupa memperbarui informasi, atau keliru menyusun laporan. Dalam sistem manual, risiko tersebut lebih tinggi karena pekerjaan sangat bergantung pada ketelitian individu dan pengecekan dokumen fisik. SDP dapat mengurangi risiko human error melalui

format data yang lebih terstandar, penyimpanan terpusat, dan proses pencarian informasi yang lebih mudah.

Studi pada Bapas Kelas I Malang menunjukkan bahwa penggunaan beberapa sistem sekaligus, seperti SDP, Google Spreadsheet, dan pencatatan manual, belum sepenuhnya efektif karena data tidak selalu sinkron dan menyulitkan penyediaan informasi secara cepat. Temuan ini menunjukkan bahwa akurasi kerja pegawai tidak hanya ditentukan oleh keberadaan SDP, tetapi juga oleh integrasi sistem dan konsistensi penggunaan data. Apabila SDP digunakan secara disiplin sebagai basis data utama, maka peluang kesalahan akibat perbedaan sumber informasi dapat ditekan.

e) Pengaruh SDP terhadap pelaporan dan pengambilan keputusan

SDP membantu pegawai dalam menyusun laporan yang lebih cepat dan akurat. Data yang sudah tercatat dalam sistem dapat digunakan sebagai dasar penyusunan laporan jumlah warga binaan, status hukum, kegiatan pembinaan, pemenuhan hak, hingga kondisi hunian. Dengan demikian, pegawai tidak perlu mengolah seluruh data dari awal setiap kali laporan dibutuhkan. Akurasi laporan juga berpengaruh terhadap kualitas pengambilan keputusan pimpinan. Keputusan mengenai pembinaan, pengamanan, pelayanan hak, maupun kebijakan kelembagaan membutuhkan data yang valid. Jika data yang digunakan tidak akurat, maka keputusan yang dihasilkan juga berisiko keliru. Oleh karena itu, SDP berperan sebagai pendukung pengambilan keputusan berbasis data.

f) Keterbatasan pengaruh SDP terhadap efisiensi dan akurasi

Meskipun SDP memiliki pengaruh positif, efektivitasnya tetap memiliki batas. Kendala seperti jaringan internet tidak stabil, kerusakan aplikasi, keterbatasan perangkat, dan kemampuan pegawai yang belum merata dapat menghambat efisiensi kerja. Penelitian di Lapas Kelas IIA Wirogunan menunjukkan bahwa pelaksanaan SDP masih menghadapi hambatan berupa koneksi internet tidak stabil, aplikasi self service yang rusak, dan sistem yang belum mendukung perhitungan tertentu. Hambatan seperti ini menunjukkan bahwa teknologi tidak boleh dipahami sebagai solusi tunggal.

Dengan demikian, SDP berpengaruh besar terhadap efisiensi dan akurasi kerja pegawai pasyarakatan melalui percepatan administrasi, peningkatan ketepatan data, pengurangan human error, kemudahan pelaporan, dan dukungan terhadap pengambilan keputusan. Namun, manfaat tersebut hanya dapat tercapai apabila didukung oleh infrastruktur yang memadai, pelatihan pegawai, integrasi data, serta kedisiplinan dalam penggunaan sistem (Wibowo dkk., 2025).

Hambatan dalam Pemanfaatan SDP

Pemanfaatan Sistem Database Pasyarakatan (SDP) pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat administrasi, meningkatkan akurasi data, dan mendukung pelayanan pasyarakatan yang lebih transparan. Namun, dalam praktiknya, penggunaan SDP tidak selalu berjalan optimal. Hambatan dapat muncul dari aspek teknis, sumber daya manusia, infrastruktur, keamanan data, hingga budaya kerja organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan teknologi tidak otomatis meningkatkan produktivitas apabila tidak didukung oleh kesiapan

sistem dan pegawai. Dengan kata lain, SDP memang dapat menjadi alat bantu kerja, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada kualitas pelaksanaan di lapangan (Sartika, 2025).

a) Keterbatasan infrastruktur teknologi

Hambatan pertama dalam pemanfaatan SDP adalah keterbatasan infrastruktur teknologi. Tidak semua satuan kerja masyarakat memiliki fasilitas teknologi yang sama. Beberapa Lapas, Rutan, Bapas, atau UPT masyarakat masih menghadapi keterbatasan perangkat komputer, jaringan, server, dan sarana pendukung lainnya. Kondisi ini dapat menghambat pegawai dalam mengakses, memperbarui, dan mengolah data secara tepat waktu.

Keterbatasan infrastruktur menjadi semakin serius apabila satuan kerja berada di daerah yang akses internetnya belum stabil. SDP sebagai sistem berbasis digital membutuhkan konektivitas yang memadai agar data dapat diperbarui dan disinkronkan secara berkala. Apabila jaringan lambat atau sering terputus, pegawai akan mengalami kesulitan dalam melakukan input data, mengakses informasi warga binaan, atau menyusun laporan. Penelitian mengenai penerapan SPBE melalui SDP juga menegaskan bahwa keterbatasan infrastruktur, terutama di daerah terpencil, memengaruhi konektivitas internet dan aksesibilitas sistem.

b) Gangguan jaringan dan masalah teknis aplikasi

Hambatan berikutnya adalah gangguan jaringan serta masalah teknis pada aplikasi. Dalam praktik kerja harian, SDP menuntut pembaruan data yang terus-menerus. Jika koneksi internet tidak stabil, maka proses pembaruan informasi masyarakat akan terganggu. Akibatnya, pegawai tidak dapat bekerja secara cepat, bahkan terkadang harus menunda pekerjaan atau kembali menggunakan pencatatan manual sementara.

Studi di Lapas Kelas IIA Wirogunan Yogyakarta menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan SDP antara lain koneksi internet yang tidak stabil, aplikasi self service yang rusak, dan aplikasi yang belum mendukung perhitungan tahun kabisat. Kendala tersebut tampak sederhana, tetapi dapat berdampak besar terhadap pelayanan. Misalnya, ketika aplikasi self service rusak, warga binaan tidak dapat mengakses informasi hak-haknya secara mandiri sehingga harus kembali bertanya kepada petugas. Hal ini justru menambah beban kerja pegawai.

c) Kompetensi dan literasi digital pegawai yang belum merata

Pemanfaatan SDP juga terhambat oleh kemampuan pegawai yang belum merata dalam menggunakan teknologi. Tidak semua pegawai memiliki latar belakang atau pengalaman yang cukup dalam mengoperasikan sistem informasi. Sebagian pegawai mungkin mampu menggunakan SDP dengan baik, tetapi sebagian lainnya masih membutuhkan pendampingan, pelatihan, atau waktu adaptasi yang lebih panjang.

Masalah ini penting karena SDP hanya akan menghasilkan data yang akurat apabila pegawai memahami cara menginput, memperbarui, memverifikasi, dan membaca data dengan benar. Jika pegawai kurang memahami sistem, maka risiko kesalahan input, keterlambatan pembaruan, dan ketidaksesuaian data tetap dapat terjadi. Beberapa kajian menunjukkan bahwa pelatihan operator dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan penting dalam implementasi

SDP. Hambatan utama bahkan dapat muncul dari keterbatasan pelatihan operator, kinerja server yang belum stabil, dan ketidaksesuaian antara data input dengan tampilan dashboard laporan.

d) Resistensi terhadap perubahan sistem kerja

Hambatan lain yang sering muncul adalah resistensi terhadap perubahan. Pergeseran dari sistem manual menuju sistem digital menuntut perubahan kebiasaan kerja. Pegawai yang sebelumnya terbiasa menggunakan dokumen fisik, buku register, atau pencatatan manual mungkin membutuhkan waktu untuk menerima pola kerja baru. Dalam kondisi tertentu, resistensi ini dapat menyebabkan penggunaan SDP tidak maksimal.

Masalahnya, jika pegawai tetap mempertahankan cara manual sambil menggunakan SDP, maka pekerjaan justru menjadi ganda. Pegawai harus mengisi sistem digital, tetapi juga tetap membuat catatan manual untuk cadangan. Kondisi ini dapat mengurangi efisiensi dan menambah beban administrasi. Oleh karena itu, hambatan budaya kerja perlu diperhatikan. Digitalisasi tidak hanya soal menyediakan aplikasi, tetapi juga membangun kebiasaan baru yang konsisten, tertib, dan berbasis data.

e) Keamanan dan perlindungan data pribadi

SDP memuat data sensitif warga binaan, seperti identitas pribadi, status hukum, riwayat pidana, catatan pembinaan, kesehatan, hingga informasi keluarga. Oleh karena itu, keamanan data menjadi hambatan sekaligus tantangan penting. Apabila sistem tidak dilindungi dengan baik, terdapat risiko kebocoran data, penyalahgunaan informasi, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang. Keamanan data tidak boleh dianggap sebagai urusan teknis semata, karena berkaitan langsung dengan hak warga binaan dan kepercayaan publik terhadap sistem pemasyarakatan. Kajian tentang SDP menekankan bahwa perlindungan privasi, protokol keamanan data, dan mekanisme audit perlu diperkuat agar sistem digital tidak menimbulkan masalah baru. Dengan demikian, peningkatan pemanfaatan SDP harus disertai penguatan keamanan informasi.

f) Integrasi data dan koordinasi antarinstansi

Hambatan terakhir adalah belum optimalnya integrasi data dan koordinasi antarinstansi. Pemasyarakatan tidak berdiri sendiri, tetapi berkaitan dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi lain dalam sistem peradilan pidana. Jika data antarinstansi belum terhubung dengan baik, pegawai tetap harus melakukan verifikasi secara manual atau menunggu dokumen dari lembaga lain. Kurangnya koordinasi juga dapat menghambat pelayanan, khususnya dalam pengawasan klien pemasyarakatan dan pelaksanaan hak integrasi. Penelitian tentang pembebasan bersyarat menunjukkan adanya hambatan berupa sistem database yang lemah, kurangnya koordinasi, dan kebutuhan pembaruan fitur agar data lapangan dapat terintegrasi lebih baik.

Dengan demikian, hambatan dalam pemanfaatan SDP meliputi keterbatasan infrastruktur, gangguan jaringan, masalah teknis aplikasi, kompetensi pegawai yang belum merata, resistensi perubahan, risiko keamanan data, serta lemahnya integrasi antarinstansi. Hambatan-hambatan ini perlu diatasi agar SDP benar-benar mampu

meningkatkan produktivitas kerja pegawai masyarakat, bukan hanya menjadi sistem administratif tambahan (Fabriane dkk., 2024).

Upaya Optimalisasi Pemanfaatan SDP untuk Meningkatkan Produktivitas

Optimalisasi pemanfaatan Sistem Database Masyarakat (SDP) merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa sistem digital ini benar-benar mampu meningkatkan produktivitas kerja pegawai masyarakat. SDP tidak cukup hanya tersedia sebagai aplikasi administrasi, tetapi harus digunakan secara konsisten, terintegrasi, aman, dan sesuai dengan kebutuhan kerja pegawai di lapangan. Produktivitas pegawai akan meningkat apabila SDP mampu mempercepat proses kerja, mengurangi pekerjaan manual, meningkatkan ketepatan data, mempermudah pelaporan, serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Namun, manfaat tersebut tidak dapat tercapai apabila masih terdapat kendala seperti jaringan tidak stabil, kemampuan pegawai yang belum merata, data yang tidak sinkron, serta belum optimalnya integrasi antarunit. Oleh karena itu, optimalisasi SDP perlu dilakukan melalui penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perbaikan prosedur kerja, perlindungan data, dan evaluasi sistem secara berkelanjutan (Julianne & Indawati, 2025).

a) Penguatan infrastruktur teknologi informasi

Upaya pertama yang perlu dilakukan adalah memperkuat infrastruktur teknologi informasi di seluruh satuan kerja masyarakat. SDP sebagai sistem digital sangat bergantung pada ketersediaan perangkat komputer, jaringan internet, server, serta sistem pendukung lain yang stabil. Apabila infrastruktur tidak memadai, pegawai akan kesulitan melakukan input, pembaruan, pencarian, dan pengolahan data secara cepat. Akibatnya, produktivitas kerja justru dapat menurun karena pegawai harus menunggu sistem berjalan atau kembali menggunakan pencatatan manual.

Penguatan infrastruktur perlu diarahkan pada pemerataan akses teknologi di Lapas, Rutan, LPKA, dan Bapas, terutama di daerah yang masih memiliki kendala konektivitas. Rekomendasi dalam kajian SDP juga menekankan pentingnya investasi pada infrastruktur TIK dan konektivitas internet yang andal agar implementasi SDP dapat berjalan meluas dan konsisten. Dengan jaringan yang stabil, pegawai dapat bekerja lebih cepat, laporan dapat diperbarui tepat waktu, dan data warga binaan dapat diakses secara lebih efisien sesuai kewenangan.

b) Peningkatan kapasitas dan literasi digital pegawai

Optimalisasi SDP juga harus dilakukan melalui peningkatan kapasitas pegawai. Sistem yang baik tidak akan memberikan hasil maksimal apabila pegawai belum memahami cara penggunaannya. Pelatihan tidak boleh hanya diberikan pada awal penerapan sistem, tetapi perlu dilakukan secara berkala agar pegawai mampu menyesuaikan diri dengan pembaruan fitur, prosedur input data, serta standar keamanan informasi.

Pelatihan pegawai perlu mencakup cara memasukkan data dengan benar, memperbarui informasi warga binaan, memverifikasi kelengkapan dokumen, menyusun laporan, dan membaca data untuk kebutuhan pengambilan keputusan. Kajian tentang integrasi SDP menunjukkan bahwa pengembangan SDP ke depan

perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, perluasan infrastruktur digital, serta integrasi antarinstansi penegak hukum. Dengan peningkatan literasi digital, pegawai tidak hanya menjadi pengguna sistem, tetapi juga mampu memahami fungsi strategis SDP dalam mendukung produktivitas dan akuntabilitas kerja.

c) Standarisasi prosedur input dan validasi data

Produktivitas kerja pegawai sangat bergantung pada kualitas data yang tersedia dalam SDP. Apabila data yang dimasukkan tidak lengkap, tidak seragam, atau tidak diperbarui secara rutin, maka sistem tidak dapat menjadi dasar kerja yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan standarisasi prosedur input dan validasi data di seluruh satuan kerja.

Standarisasi ini dapat dilakukan melalui penyusunan pedoman teknis yang jelas mengenai jenis data yang harus dimasukkan, waktu pembaruan data, pihak yang bertanggung jawab, serta mekanisme verifikasi. Data warga binaan seperti identitas, status hukum, masa pidana, catatan pembinaan, kesehatan, pelanggaran, dan usulan hak integrasi harus dikelola dengan format yang seragam. Tanpa standarisasi, perbedaan cara input antarpegawai atau antarunit dapat menyebabkan data tidak sinkron. Studi pada Bapas Kelas I Malang menunjukkan bahwa penggunaan beberapa sistem sekaligus, yaitu SDP, Google Spreadsheet, dan pencatatan manual, belum mampu memfasilitasi pengelolaan data secara efektif dan efisien ketika data tidak terintegrasi dengan baik.

d) Integrasi SDP dengan sistem kerja dan instansi terkait

Optimalisasi SDP juga memerlukan integrasi yang lebih kuat, baik di internal masyarakat maupun dengan instansi eksternal. Dalam sistem peradilan pidana, masyarakat berkaitan erat dengan kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan instansi lain. Jika data antarinstansi belum terhubung, pegawai tetap harus melakukan verifikasi manual, menunggu dokumen fisik, atau menghubungi lembaga lain secara terpisah. Kondisi ini tentu mengurangi efisiensi kerja.

Ke depan, SDP perlu dikembangkan sebagai platform yang terhubung dengan sistem informasi penegak hukum lainnya. Integrasi semacam ini dapat mempercepat alur administrasi, memudahkan pelacakan status hukum, serta memperkuat koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan warga binaan. Kajian mengenai arah pengembangan SDP menekankan bahwa SDP perlu diarahkan menjadi platform masyarakat terintegrasi yang terhubung dengan sistem kepolisian, kejaksaan, dan peradilan. Dengan integrasi tersebut, pegawai dapat bekerja lebih produktif karena tidak lagi terbebani oleh proses konfirmasi data yang berulang.

e) Penguatan keamanan dan perlindungan data

Karena SDP memuat data sensitif warga binaan, optimalisasi sistem harus disertai dengan penguatan keamanan data. Data mengenai identitas, status hukum, kesehatan, catatan pelanggaran, dan riwayat pembinaan tidak boleh diakses sembarangan. Jika keamanan data lemah, risiko kebocoran informasi, penyalahgunaan data, dan pelanggaran privasi dapat terjadi.

Upaya penguatan keamanan dapat dilakukan melalui pengaturan hak akses pengguna, penggunaan kata sandi yang kuat, audit sistem secara berkala,

pencatatan aktivitas pengguna, serta edukasi kepada pegawai mengenai kerahasiaan data. Perlindungan data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga bagian dari tanggung jawab etik dan hukum dalam pelayanan masyarakat. Kajian SDP menegaskan bahwa perlindungan data pribadi warga binaan menjadi salah satu aspek penting dalam pengembangan SDP.

f) Monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan

Optimalisasi SDP tidak dapat dilakukan sekali saja, tetapi harus melalui monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah SDP benar-benar membantu pegawai bekerja lebih cepat, mengurangi kesalahan, meningkatkan pelayanan, dan memperbaiki kualitas pelaporan. Evaluasi juga dapat mengidentifikasi fitur yang belum sesuai dengan kebutuhan lapangan. Umpan balik dari pegawai sangat penting karena mereka adalah pengguna langsung sistem. Jika terdapat fitur yang sulit digunakan, tampilan data yang kurang jelas, atau proses input yang terlalu panjang, maka perbaikan perlu dilakukan. Pendekatan berbasis kebutuhan pengguna dapat meningkatkan efektivitas dan kepuasan penggunaan sistem, sebagaimana terlihat dalam rancangan dashboard Bapas yang menekankan evaluasi desain dan perbaikan berdasarkan masukan pengguna.

Dengan demikian, optimalisasi pemanfaatan SDP untuk meningkatkan produktivitas pegawai masyarakat perlu dilakukan secara menyeluruh. Penguatan infrastruktur, pelatihan pegawai, standarisasi data, integrasi sistem, keamanan informasi, serta evaluasi berkala merupakan langkah utama agar SDP tidak hanya menjadi alat administrasi, tetapi benar-benar menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas kerja pegawai masyarakat (Maharani & Arsawati, 2025).

SIMPULAN

Pemanfaatan Sistem Database Masyarakat (SDP) memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas kerja pegawai masyarakat. SDP membantu pegawai dalam mengelola data warga binaan secara lebih cepat, tertib, dan terintegrasi, sehingga pekerjaan administrasi yang sebelumnya banyak dilakukan secara manual dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Melalui SDP, proses pendataan, pemenuhan hak narapidana, pelaporan, pengawasan, serta pengambilan keputusan dapat dilakukan berdasarkan data yang lebih akurat dan mudah diakses. Pengaruh SDP terhadap produktivitas terlihat dari meningkatnya efisiensi waktu kerja, berkurangnya risiko kesalahan pencatatan, serta meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat. Pegawai dapat lebih mudah melakukan verifikasi data, menyusun laporan, dan memantau perkembangan warga binaan. Namun, efektivitas pemanfaatan SDP belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat hambatan seperti jaringan internet yang tidak stabil, keterbatasan infrastruktur teknologi, kemampuan pegawai yang belum merata, serta belum maksimalnya integrasi data antarinstansi. Dengan demikian, SDP dapat menjadi instrumen strategis dalam mendukung reformasi birokrasi masyarakat apabila digunakan secara konsisten dan didukung oleh sumber daya yang memadai. Optimalisasi SDP perlu dilakukan melalui pelatihan pegawai, penguatan infrastruktur, standarisasi

input data, perlindungan keamanan informasi, serta evaluasi sistem secara berkelanjutan.

DAFTAR RUJUKAN

- Fabrianne, H., Tolle, H., & Nugraha, D. C. A. (2024). Perancangan User Experience Dashboard dan Modul Pelaporan pada Sistem Informasi Manajemen di Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kelas 1 Malang Menggunakan Pendekatan Human Centered Design. *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 8(4). <https://j-ptiik.ub.ac.id/index.php/j-ptiik/article/view/13632>
- Julianne, R. C., & Indawati, Y. (2025). Pelaksanaan Pencabutan Hak Pembebasan Bersyarat bagi Klien Pemasarakatan yang Melakukan Tindak Pidana pada Masa Tenggang (Studi Kasus di Balai Pemasarakatan Kelas I Surabaya). *Gorontalo Law Review*, 23–34.
- Kutaraja, R. D., & Nasution, A. (2025). Pelaksanaan Prinsip Good Governance Terhadap Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Banda Aceh. *Meukuta Alam: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 7(2), 264–276. <https://doi.org/10.33059/majim.v7i2.13685>
- Maharani, N. M. D., & Arsawati, N. N. J. (2025). Analisis Yuridis Pengaturan Sanksi Tindakan Dalam Upaya Mengatasi Prison Overcapacity. *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)*, 6(02), 142–160. <https://doi.org/10.61689/jpehi.v6i02.795>
- Nafi, G. Z., & Priyatmono, B. (2025). Upaya Pemenuhan Hak Narapidana Melalui Pelayanan Kesehatan Terhadap Keluhan Penyakit Mata Conjunctivitis Narapidana di Lembaga pemasarakatan Kelas IIA Cibinong. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(4), 5161–5170. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2098>
- Putri, D. A., Budiman, H., & Andriyani, Y. (2025). Efektivitas Peran Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Kuningan dalam Menjamin Hak Cuti Bersyarat Narapidana. *Constituer: Jurnal Hukum Ketatanegaraan*, 1(1), 1–18.
- Sartika, I. (2025). Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Melalui Sistem Database Pemasarakatan (SDP) Guna Mewujudkan Good Governance Di Lembaga Pemasarakatan. *Private Law*, 5(3), 955–969.
- Susanto, H., Susilowati, T., & Andri, M. (2025). Analisis Terhadap Warga Binaan Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas Iib Kabupaten Jombang). *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 8–13.
- Wibowo, A. S., Humanika, D. P., Haryadi, E. R., & Fakihudin, M. B. T. (2025). Integration of the Correctional Database System to Improve the Effectiveness of Prisoner Guidance in Indonesia: Integrasi Sistem Database Pemasarakatan (SDP) dalam Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Narapidana di Indonesia. *Jurnal Pemasarakatan dan Keadilan*, 1(3), 158–168.
- Zulfedryan, M., & Santoso, I. (2025). Peran Petugas Pemasarakatan Dalam Proses Resosialisasi Narapidana Guna Keberhasilan Pembinaan di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Balikpapan. *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5878–5888. <https://doi.org/10.61104/alz.v3i5.2247>